

BAB 1

PENDAHULUAN

Alasan Pilihan Studi

Dorongan untuk melakukan studi tentang pembangunan pada UKSW Salatiga dilatarbelakangi oleh hal-hal berikut. Pertama, penulis ingin memperdalam pengetahuan tentang pembangunan untuk melihat relevansi karya-karya Pastoral Gereja dari perspektif Studi Pembangunan. Kedua, ketika dipercayakan melakukan tugas kemasyarakatan oleh pimpinan Keuskupan Jayapura melalui pelayanan bidang sosial ekonomi umat, penulis merasakan perlu meningkatkan kapasitas diri sebagai pelayan umat dan masyarakat dengan pengetahuan yang relevan agar mampu mendampingi umat dan masyarakat dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. Ketiga, sebagai seseorang yang lahir, besar, dan hidup di tengah-tengah orang Papua dan bekerja di lingkungan pendidikan tinggi melalui STFT Fajar Timur maupun di kalangan masyarakat luas, muncul sejumlah keprihatinan tentang masalah-masalah pembangunan masyarakat di Tanah Papua.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dibuat suatu pilihan studi lanjut tentang permasalahan pengembangan kelapa sawit di Papua dan dampaknya bagi penduduk setempat ditinjau dari perspektif pembangunan. Sebelum studi ini dilakukan, secara pribadi penulis beranggapan bahwa pendekatan pembangunan yang digunakan dengan cara pengembangan ekonomi melalui sistem pendekatan monokultur kelapa sawit merupakan salah satu solusi yang tepat bagi peningkatan kesejahteraan penduduk di Papua. Ternyata bentuk intervensi *livelihood* baru melalui perkebunan kelapa sawit bagi penduduk setempat mempunyai dampak terhadap berbagai aspek kehidupan.

Pertanyaannya ialah apakah ada yang keliru dalam pendekatan pembangunan tersebut? Atau apakah pendekatan pembangunan yang dilakukan selama ini secara substansial merupakan penerapan paradigma pembangunan berkelanjutan atau tidak? Bagaimana mengembangkan pendekatan pembangunan yang relevan dalam perspektif orang Papua secara berkelanjutan? Jawaban yang dicari atas pertanyaan ini mendorong penulis untuk melakukan studi ini.

Antara yang Lama dan yang Baru

Kesejahteraan penduduk asli Indonesia di kampung-kampung pada umumnya tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan hutan, tanah, sungai, rawa-rawa dan gunung dan lembah-lembah yang dimilikinya sebagai pusat habitat *livelihood* [Gee & Gomes (Penyunting), 1993; Suebu, 2007; Marti, 2008; Colchester & Caho (Editor), 2012 & 2013; Franky & Morgan (Penyunting), 2015; Enembe, 2016]. Oleh karena itu berbagai intervensi pembangunan yang tidak memperhatikan aspek hubungan penduduk lokal dengan pusat habitat *livelihood* penduduk sudah tentu akan menimbulkan masalah di berbagai aspek kehidupannya. Karena bagi penduduk setempat mekanisme bertahan hidup secara berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam waktu yang lama telah terkonsruksi secara sosial budaya (Pierotti, 2011; Berger & Luckmann, 2013) sedemikian rupa sehingga mereka tetap eksis dan ada bersama yang lain. Dengan kata lain intervensi pembangunan selalu berdampak menimbulkan tekanan, guncangan dan trauma bagi keberadaan masyarakat di satu sisi tetapi di sisi lain berdampak mengembangkan, memperbaharui dan meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai proses transformasi ke dalam suatu pengetahuan baru, tradisi baru dan pembiasaan atau habitus baru.

Pengalaman masyarakat berhadapan dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, menurut Lauer (1993) mengutip Spicer, menyatakan akan memunculkan apa yang disebut mitos penyimpangan dan mitos trauma. Mitos Penyimpangan, dilatarbelakangi pemikiran

bahwa institusi, nilai-nilai atau pola kebudayaan dibayangkan stabil terus-menerus. Dengan demikian bila ada perubahan, keadaan itu dinilai sebagai suatu penyimpangan yang merugikan manusia dan bukan dilihat sebagai suatu proses perubahan dan pembaharuan. Selain itu terdapat pula mitos yang disebut mitos trauma. Menurut paham ini perubahan dianggap abnormal, merupakan suatu “siksaan”, “agen asing yang tak dikehendaki” yang menimbulkan “krisis” bagi masyarakat. Oleh karena itu dikatakan oleh Spicer ada 3 hal dalam perubahan yang menantang yaitu, a). perubahan dibayangkan dapat mengancam keamanan mendasar manusia; b) perubahan itu tidak dipahami; c) perubahan sebagai paksaan terhadap suatu masyarakat. Secara teoritis, perspektif fungsionalisme-struktural, tidak mendukung mitos tersebut karena ia memusatkan perhatian dan dukungannya pada tatanan sosial yang ditandai oleh struktur dan sistem yang stabil serta terintegrasi dan harmonis antara bagian-bagian. Maka untuk memahami apa yang terjadi dalam konteks kehidupan suatu masyarakat, dikatakan oleh Mills (2000) dalam bukunya, *The Sociological Imagination*, tidak ada kehidupan individu maupun masyarakat yang dapat dipahami tanpa memahami sejarah kehidupan keduanya.

Sehubungan dengan latar belakang berpikir dikotomis tentang apa yang menghambat dan mendukung pembangunan muncul suatu pemikiran yang menyebut aspek kultural yang di dalamnya terdapat nilai-nilai tradisional yang merupakan salah satu penghambat pembangunan atau modernisasi (Bdk., Crew & Harrison, 1998). Sehubungan dengan perbedaan paradigma terhadap pembangunan Arief Budiman (2005), mengisahkan bagaimana kaum intelektual Indonesia masuk ke dalam polarisasi dikotomik tersebut. Arief pun menyatakan, S.T. Alisyahbana merupakan salah satu intelektual Indonesia yang menentang keras nilai-nilai tradisional dalam pembangunan. Menurut Arief, dalam sebuah makalah ceramah Alisyahbana menyatakan nasionalisme pada zaman sekarang sudah merupakan suatu paham yang kuno. Sekarang ini zaman ilmu pengetahuan, di mana manusia dengan ilmu tersebut dapat menundukkan alam sehingga bangsa Indonesia harus menyesuaikan diri dengan filsafat tersebut. Menurut Arief, Alisyahbana menyerang

nilai-nilai tradisional di Indonesia sebagai penghambat pembangunan atau jalan masuk ke dunia modern. Pandangan ini kemudian menimbulkan reaksi dan Arief menyatakan cara berpikir demikian adalah cara berpikir intelektual Indonesia sebelum perang yang dibesarkan oleh penjajahan Belanda dan pikiran rasional Barat yang melihat kebudayaan tradisional tidak efisien. Menurut Arief, kita perlu membangun suatu sikap baru dengan pendekatan baru. Dicontohkannya, Soedjatmoko merupakan seorang tokoh intelektual Indonesia yang mulai berbicara tentang *the interior views*, yang menegaskan, “bagaimana menemukan mutu *modus views* di depan nilai-nilai tradisional tanpa menjadi mangsa daripadanya”. Arief sendiri kemudian bersikap dengan menyatakan sistem nilai yang dipelihara, diteruskan dan dikembangkan oleh satu kelompok manusia dari satu generasi ke generasi berikut adalah hasil dari seseorang yang lahir dan terintegrasi dalam kelompoknya, berorientasi ke lingkungan sekitarnya dengan cara yang sama dan dengan nilai-nilai tersebut manusia saling berkomunikasi dalam waktu yang relatif lama. Karena itu menurut Arief “ada bersama” sebagai bagian dari suatu kelompok menyangkut hakekat kemanusiaan, di mana seseorang lebih suka menyesuaikan diri dengan kultur yang ada sehingga orang akan merasa aman dalam arti seluas-luasnya. Sedangkan jika berbicara mengenai modernisasi suatu bangsa sebenarnya kita berbicara tentang membentuk suatu kultur baru dan menggantikan kultur yang diterima bukan tanpa kecurigaan. Suatu nilai baru yang datang memerlukan waktu untuk diterima karena yang terjadi ialah proses peralihan indentifikasi. Menurut Arief di sinilah masalahnya, banyak intelektual mau melihat bangsanya cepat maju menjadi modern, dengan memaksa menerima nilai-nilai baru. Dikatakannya, pada titik inilah Soedjatmoko berbicara mengenai krisis identitas. Karena memang nilai-nilai baru yang modern mulai masuk dan menarik tetapi nilai-nilai tradisional masih dipegang. Semakin orang didesak ia akan semakin fanatik mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Menurut hemat penulis apa yang disikapi Arief dan Soedjatmoko penting dilihat juga dalam catatan Muller (2006, 151) berikut ini.

“setiap kebudayaan menyediakan suatu kerangka orientasi yang memberi makna pada kehidupan manusia serta mengarahkan tingkah laku dan tindakan orang dari kebudayaan tersebut sebagai hasil dari proses sejarah yang panjang. Oleh sebab itu setiap kebudayaan pada dasarnya tak tergantikan dan patut dilindungi, karena setiap budaya mempunyai unsur-unsur yang positif di satu sisi dan di sisi lain perlu disadari juga segi-segi negatif dari kebudayaan agar bisa terhindar dari romantisme budaya”.

Selain Muller, Kleden (1989) pun menyatakan, kesulitan di Indonesia modern ialah bagaimana mengidentifikasi antara penolakan terhadap sikap tradisional dan penolakan terhadap tradisi itu sendiri. Karena yang sebenarnya terjadi ialah perubahan tempat ketergantungan, yaitu dari bergantung pada tradisi lama berpindah tergantung kepada tradisi yang lain (Barat). Padahal yang dibutuhkan dalam suatu kebudayaan adalah orang dapat membangun tradisi tanpa sikap tradisional, karena yang terjadi ialah orang membuang tradisi sambil mempertahankan sikap tradisional. Jadi sebenarnya tradisi bukan sesuatu yang jelek sebagaimana dibayangkan dalam konteks masalah pembangunan di atas. Tetapi tradisi adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu kebudayaan bukan sikap yang tradisional. Nampaknya kebanyakan orang sulit untuk membedakan antara tradisi dan sikap tradisional. Kleden memberi contoh, penelitian Clifford Geertz memperlihatkan bahwa kemiskinan di Jawa merupakan suatu produk dari sistem pertanian kolonial yang secara sistematis melumpuhkan kemampuan penduduk asli petani Jawa, karena sektor modern dan sektor tradisional pada dasarnya tidaklah terpisah sebagaimana dibayangkan orang melainkan keduanya berhubungan secara asimetris dan mandeknya sektor tradisional karena akibat dari eksploitasi sektor modern.

Dalam konteks pemikiran yang demikian muncul pertanyaan mengenai bagaimana melihat penduduk di Kampung Workwona yang sedang berubah di satu sisi tapi di sisi lain terus mempertahankan hak-haknya sebagai penduduk setempat atas hutan dan tanah yang telah beralih fungsi dan alih kepemilikan. Karena itu menurut penulis, *the interior views* dari Soedjatmoko (1983) atau yang disebut Brian Fay

sebagai epistemologi orang dalam, perlu dirujuk sebagai sebuah kearifan setempat sehingga proses peralihan identifikasi masyarakat dari kultur lama ke kultur baru tidak menimbulkan krisis atau bahkan terjerumus ke dalam suatu romantisme belaka. Karena yang diinginkan ialah terjadinya perubahan melalui pembangunan yang dapat menghasilkan munculnya suatu tradisi baru atau pembiasaan baru manusia mengembangkan diri dan hidupnya.

Bukan Pembangunanisme

Ideologi dan praktik pembangunan yang hanya mengedepankan aspek pertumbuhan oleh Berger (1982) disebut sebagai pembangunanisme (Fakih, 2000). Fakih menyebut pembangunanisme sebagai bungkus baru dari kue lama kapitalisme. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sri Edi Swasono (Kompas, 8 Maret 2014) bahwa pembangunanisme (*developmentalism*) berpandangan bahwa ideologi pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan “pengaruh yang menetes ke bawah” (*trickle down effect*) dan meluas pada semua sektor kehidupan. Kemudian muncullah kritik-kritik terhadap ideologi pembangunanisme. Berger misalnya, mencatat beberapa kritik yang muncul seperti oleh *Club of Rome*, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara terus-menerus tanpa kendali akan mengakibatkan terkurasnya semua sumber daya alam, terjadi pencemaran udara dan air, yang akan menimbulkan bencana dan keracunan pada bahan-bahan makanan. Michael Bradley (2008) pun menyatakan bahwa dengan cara demikian kehidupan di bumi akan berakhir. Berger sendiri mengutip ungkapan ekonom Brazil, Celso Furtado, yang menyatakan bahwa telah terjadi “pertumbuhan tanpa perkembangan”. Pertumbuhan tanpa perkembangan ini merupakan ketimpangan akibat campur tangan asing karena secara struktural berwatak kolonial. Watak ekonomi kolonial hanya menguras daerah koloni dan memiskinkannya (Primsa, Vol.28. No.2, Oktober 2009). Karena itu Berger dalam salah satu tesisnya menyatakan, ideologi kapitalis yang didasarkan pada mitos pertumbuhan harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya.

Relasi manusia dalam pembangunan ekonomi yang tidak seimbang seperti inilah yang disebut Galtung (dalam M. Windhu, 1992) sebagai proses eksploitasi, Marx menyebutnya sebagai *reifikasi* (Roxborough, 1990 & Berger & Luckman, 2013) dan *alienasi* (Suseno Frans Magnis, 2001). Selain itu menurut Paul Baran, sebagaimana dikutip Sarwanto (dalam Driyarkara, No. 1/Th. XIV, 1987), kapitalisme muncul dari feodalisme, dan kolonialisme Eropa Barat. Baran berpendapat, Dunia Ketiga mengalami kemandekkan akumulasi modal dan pembangunan industri karena daerah koloni bahkan menjadi korban dari kolonialisme serta kapitalisme. Selain itu kritik terhadap paradigma modernisasi yang berwatak utama pembangunan ekonomi dilakukan juga oleh Andre Gunder Frank (Majalah Driyarkara, Th. XIV No. I, Menyimak Teori-teori Pembangunan, 1987, 12-14). Dikatakan Frank dalam makalah berjudul, *Sociology of Development and Underdevelopment* (1969) seperti dikutip Sarwanto, perspektif modernisasi secara empiris tidak dapat dipertahankan, karena dari aspek teoritis tidak cukup dan secara praktis tidak mampu merangsang proses pembangunan di Dunia Ketiga. Hal ini berkaitan dengan metode yang dipakai yaitu membandingkan negara berkembang dan negara maju sebagai substansi pembangunan dan sebagai variabel pola serta tahap-tahap pembangunan. Jadi menurut Frank, keterbelakangan bukan tahap awal mula suatu daerah tetapi merupakan kondisi yang diciptakan. Dalam sumber lain Frank (Saiful Arif, 2000) berpendapat bahwa situasi ketergantungan ditentukan oleh hal-hal seperti, modal asing dan kolaborasi pemerintah lokal dengan kaum borjuis. Itulah sebabnya Frank mengkritik *International Monetary Fund* (IMF) yang berlaku sebagai dewa penolong, padahal ternyata hanya mengurus kekayaan negara miskin. Ide Frank kemudian dilengkapi oleh Dos Santos yang melihat bahwa ada tiga jenis ketergantungan Dunia Ketiga dalam hubungan antarnegara, yakni ketergantungan kolonial (ketergantungan negara koloni dengan daerah kolonial), ketergantungan finansial industri (negara maju menentukan format administrasi keuangan negara dunia ketiga), dan ketergantungan teknologi (teknologi industri negara berkembang tetap bergantung pada negara maju). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa

pembangunanisme bertentangan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, karena pembangunanisme hanya menghasilkan ketimpangan bahkan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat sampai di desa atau kampung-kampung.

Peran *Sustainable Livelihood*

Keyakinan atau lebih tepat dikatakan harapan yang ada pada setiap masyarakat yang mengalami proses pembangunan ialah identitas sebagai manusia sesuai kultur setempat yang tidak dicurigai sebagai penghambat pembangunan, tetapi dapat digunakan sebagai pintu masuk bagi pengembangan kehidupan yang lebih baik.

Menurut hemat penulis pendekatan *Sustainable Livelihood* amat relevan dalam studi ini karena dua hal. Pertama, pendekatan ini memberi tempat khusus kepada manusia dengan segala modal yang dimiliki, untuk mengembangkan kehidupan secara berkelanjutan. Kedua, pendekatan *Sustainable Livelihood* juga merupakan bagian dari paradigma pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada manusia, aset-aset dan akses yang dimiliki agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman dan berkelanjutan.

Pendekatan *Sustainable Livelihood* sebagai suatu perspektif yang menempatkan manusia sebagai subyek potensial, menyeluruh dan dinamis karena manusia mempunyai sejumlah modal, yaitu modal manusia, modal sosial, modal finansial, modal fisik, yang dapat digunakan untuk mengembangkan hidupnya menjadi lebih baik. Selain itu *Sustainable Livelihood* melihat potensi manusia yang dimiliki sebagai modal-modal hidup dapat digunakan untuk menangkal situasi yang rentan dan menghindarkan manusia dari keadaan yang penuh tekanan dan goncangan karena kehilangan aset-aset dan akses hidup sehingga bisa hidup lebih aman dan baik.

Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Penduduk

Mengapa pokok ini menjadi pokok studi yang ingin diteliti lebih jauh? Kalau memperhatikan berbagai studi tentang penduduk asli memang terkesan bahwa penduduk asli selalu menjadi “orang kalah” dalam pembangunan [Ukru, dkk, 1993; Ghee & Gomes (Penyunting), 1993; Ansaka, dkk., 2007; Dale & Djonga, 2011]. Ukru dan kawan-kawan dalam penelitian yang dilakukan di Maluku menyatakan, telah terjadi kisah-kisah penaklukan, penggusuran dan penyingkiran secara sistematis terhadap penduduk asli. Karena itu kumpulan kasus-kasus pembangunan di Maluku merupakan potret orang-orang kalah. Hal serupa juga dilukiskan oleh Ansaka dan kawan-kawan serta Dale dan Djonga. Selain itu alasan yang dikemukakan Suparlan dalam kata pengantar buku tentang studi “Suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara” [Ghee & Gomes (Penyunting), 1993] menyatakan, pembangunan sebagai kegiatan terencana dalam skala nasional dan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk menggunakan pendekatan proyek-proyek kegiatan ekonomi. Latar belakang pendekatan ini bermodel pendekatan pertumbuhan, yakni pertumbuhan ekonomi yang bersifat makro, sebagai ciri pertumbuhan materi dengan tingkat kemampuan konsumsi tertentu. Padahal pendekatan tersebut mengabaikan variasi-variasi lokal dalam sebuah kelompok masyarakat sehingga kemudian menghasilkan korban-korban pembangunan yang terdiri dari masyarakat yang terdampak pembangunan tersebut.

Dengan latar belakang permasalahan pendekatan pembangunan yang dijelaskan di atas, penulis mencoba menempatkan persoalan perkebunan kelapa sawit di Keerom Distrik Arso Kampung Workwana sebagai pokok studi dalam konteks pembangunan masyarakat. Karena itu muncul pertanyaan, mengapa kelapa sawit terus menerus dipermasalahkan oleh penduduk setempat? Memang kasus kelapa sawit bukan hanya terjadi di Workwana tetapi juga di Kampung Arsokota dan sekitarnya, bahkan di berbagai tempat di Papua dan wilayah Indonesia lainnya.

Pengalaman penolakan atau resistensi terhadap kelapa sawit juga terjadi di tempat lain di Papua. Penolakan masyarakat terhadap usaha kelapa sawit juga terjadi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Majalah Selangkah (www.majalahselangkah.com, diunduh, 26 Maret 2014) menjelaskan Kepala Suku Besar Yerisiam, Simon Petrus Hanebora menyatakan, “Perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Nabire harus segera ditutup”, karena hal-hal berikut. Pertama, melakukan eksploitasi, pembalakan liar dan proses pembiaran. Kedua, perusahaan kelapa sawit dimaksud ialah PT Nabire Baru dan PT Sariwana Unggul Mandiri, yang selama ini beroperasi di atas lahan tanah adat milik masyarakat pribumi suku Yerisiam. Menurut Kepala Suku Besar Yerisiam, yang dikutip Majalah Selangkah, penolakan tersebut disebabkan karena, “kayu, rotan dan makhluk hidup yang ada di atas areal tersebut digusur dan mati tanpa ada pertanggungjawaban. Penebangan terjadi di tempat-tempat keramat, dusun-dusun sagu sampai di tepi pantai. Ribuan pohon kayu putih dan rotan yang memiliki nilai ekonomi diterlantarkan begitu saja. Sedangkan kayu Merbau atau kayu besi terus menjadi incaran perusahaan. Menyikapi masalah tersebut, Masyarakat Adat antara lain melakukan surat-menyurat kepada DPRD Nabire, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nabire, Kapolda Papua dan BAPEDALDA Papua namun tidak digubris. Padahal urusan perkebunan tersebut sarat dengan persoalan, seperti sengketa kepemilikan hak ulayat, klaim HPH dan masalah izin, masalah analisis dampak lingkungan dari BAPEDALDA Provinsi Papua. Bahkan lebih jauh Masyarakat Adat Yerisiam membuat pernyataan sikap yang isinya: pertama, meminta Komnas HAM Pusat, Kapolri melakukan investigasi dan advokasi terhadap penyimpangan aturan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dan Perusahaan Kelapa Sawit PT Nabire Baru dan PT Sariwana Unggul Mandiri; kedua, meminta KPK menyelidiki para pejabat pemerintah daerah terkait beserta kedua perusahaan kelapa sawit karena ada indikasi suap-menyuap dan menjadi pelegitimasi aktivitas perusahaan yang sarat dengan persoalan; ketiga, meminta Ketua DPRD Nabire meletakkan jabatan sebelum PEMILU 2014 karena sebagai wakil rakyat membiarkan praktek kotor perusahaan

terus berlangsung di atas penderitaan rakyat suku besar Yerisiam dan ada indikasi terjadi politik uang dengan memanfaatkan suara karyawan perusahaan pada pemilu 2014.

Penolakan serupa ditemukan juga di Kabupaten Mimika. Hal ini disebabkan karena ada kekhawatiran pengalaman *masyarakat di Distrik Arso tentang kelapa sawit akan dialami juga oleh masyarakat Papua lainnya*. Evert Joumilena dari *Tabloid Jubi* memberitakan bahwa Bupati Eltinus Omaleng, SE., di Timika menutup kegiatan usaha Perusahaan kelapa sawit PT. Pusaka Agro Lestari (PT PAL), dengan mencabut izin usaha melalui Surat Keputusan Bupati di kantor perusahaan kepada Direktur PT.PAL, Prabat Karan. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Wakil Bupati Mimika dan Muspida setempat di Distrik Iwaka, Timika, pada 17 Desember 2014. Perusahaan ini mendapat izin operasi sejak tahun 2007 dari Bupati Mimika saat itu dan kemudian perusahaan ini ditutup setelah rapat paripurna DPRD setempat menilai usaha ini berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat terkait dengan kerusakan lingkungan (<http://www.jeratpapua.org/2014/12/21/perusahaan-kelapa-sawit-pt-pal-di-tutup-bupati-mimika/>, diunduh 10 Juli 2015). Sikap ini ditunjukkan kepala daerah tersebut karena dalam Otonomi Khusus Papua, perhatian, perlindungan dan keberpihakan kepada masyarakat asli Papua dalam berbagai aspek pembangunan daerah merupakan prioritas politik pembangunan sesuai dengan semangat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Sikap tegas Bupati dan anggota DPRD Kabupaten Mimika ini mengindikasikan betapa seriusnya pemerintah daerah setempat memperhatikan dampak lingkungan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat saat ini dan di masa depan. Masalahnya ialah apakah sikap yang tegas dan konsisten dengan komitmen tinggi untuk kepentingan masyarakat seperti ini akan terus dipertahankan para pimpinan daerah di Papua.

Penolakan yang sama terhadap usaha perkebunan kelapa sawit juga dilakukan oleh orang Yei (*Yeinan*), di Kabupaten Merauke. Sebagaimana dijelaskan kepada *Jurnal Jubi* oleh Bapak David Gagijay salah satu warga suku Yei bahwa sekarang ini sedang terjadi tarik ulur

antara masyarakat dengan PT Wilmar Group yang ingin dan berupaya membuka lahan perkebunan kelapa sawit di daerah orang Yei sepanjang wilayah Sungai Maro. Menurut Bapak David, pada umumnya masyarakat menolak perusahaan kelapa sawit. Perusahaan ini merencanakan akan membuka kebun kelapa sawit seluas 40.000 hektare, di Kampung Poo, Torai, Erambu, Kweel, Bupul dan Tanas. Dikatakan oleh David seperti dicatat Jurnal Jubi, dua kampung telah menyetujui pembukaan lahan kelapa sawit yaitu, Kampung Bupul dan Poo. Alasan penolakan ialah warga penduduk Yei tidak mau ditipu, karena belajar dari pengalaman orang Marind, ternyata masyarakat ditipu oleh perusahaan kelapa sawit, demikian pernyataan Laksmi A. Savitri (2013). Orang Marind sekarang menderita karena kehilangan mata pencaharian, sulit berburu rusa di hutan, hutan sudah habis dibabat, air tercemar dan kering sehingga masyarakat sulit mencari air. Menurut David, sekarang sudah ada satu perusahaan tebu yang beroperasi di daerah ini yaitu PT. Hardayat. Sudah cukup, satu perusahaan saja yang kami izinkan. Kami menolak kelapa sawit karena waktu tanam juga memakan waktu lama. Sedangkan perusahaan tebu diizinkan karena tidak memakan waktu yang lama (<http://tabloidjubi.com/2012/12/23/suku-yeinan-tolak-perusahaan-sawit/>, diunduh 18 November 2015)

Selanjutnya, melalui studi ini permasalahan tersebut mau disoroti dari pengalaman di Workwana walaupun urusan kelapa sawit di tempat ini selalu berkaitan pula dengan Kampung Arsokota dan beberapa kampung lain di Distrik Arso sebagai suatu kelompok masyarakat adat yang disebut masyarakat adat Arso. Maka untuk menjawab pertanyaan di atas, studi kasus ini dilakukan di Workwana dengan alasan pilihan dan penggunaan metodologi pengumpulan data lapangan, persepsi ilmu atau teori yang dipakai hanya untuk menganalisa dan melakukan refleksi atas fenomena kehidupan penduduk di Kampung Workwana. Beberapa hal temuan yang membedakan studi kasus ini dengan hasil penelitian SKP Jayapura dan studi lainnya ialah fokus studi diarahkan pada masyarakat Kampung Workwana. Kemudian dipilih jenis studi yakni studi kasus dan studi fenomenologi, dengan beberapa metode pengumpulan data untuk

memperdalam permasalahan yang ada. Kemudian dari perspektif ilmu yang menjadi latar belakang analisis dan refleksi terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan juga membedakan studi ini dengan penelitian lainnya karena studi ini menggunakan perspektif *Livelihood*. Hasil studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan-pendekatan pembangunan yang dilakukan menghasilkan beberapa gejala atau fenomena, seperti adanya resistensi moral-sosial masyarakat terhadap perkebunan kelapa sawit yang sudah beroperasi lebih dari 32 tahun di daerah ini. Selain itu ditemukan juga adanya kapabilitas penduduk yang mampu melihat peluang pembangunan yang ada sekaligus melakukan strategi *coping* untuk mengurangi kondisi kerentanan sosial-budaya dan ekonomi dengan menggunakan modal-modal yang ada. Dengan demikian gambaran penduduk dalam pembangunan tidak sekedar sebagai “orang kalah” tetapi juga sebagai orang-orang yang mampu menggunakan modal manusia yang dipunyai untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik saat ini dan untuk generasi masa depan. Karena itu penduduk setempat pun menilai bahwa pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan pengembangan kelapa sawit berfungsi sebagai kegiatan pembangunan ekonomi sebagai fungsi manifest, tetapi sesungguhnya pembangunan yang dilakukan mempunyai fungsi laten yaitu pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam berupa kayu dan sumber daya hutan lainnya sebagai komoditi ekspor; kedua, sebagai pintu masuk mewujudkan kepentingan pembangunan politik keamanan daerah perbatasan antarnegara. Untuk kepentingan keamanan perbatasan, hutan-hutan harus digundulkan agar tidak menjadi tempat persembunyian kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka.

Hasil Studi Lapangan

Hasil studi lapangan dan kajian teoritis dalam seluruh tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagian pertama, berisikan pendahuluan yang sebenarnya memuat latar belakang kenapa studi ini dilakukan dan apa kontribusi studi ini. Bagian kedua, memuat perspektif teoritis *Livelihood* dengan tekanan pada *Sustainable*

Livelihood, untuk menganalisis dan merefleksikan fenomena yang ditemui dalam studi kasus di lapangan. Bagian ketiga, merupakan gambaran umum tentang sejarah perkembangan daerah Distrik Arso dan Kampung Workwana yang menjadi wilayah penelitian. Bagian keempat, terdiri dari penjelasan khusus mengenai jenis studi dan pilihan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian serta teknik-teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan. Bagian kelima, berbicara mengenai perkembangan kelapa sawit di Kampung Workwana. Kemudian bagian keenam, merupakan uraian tentang konflik yang terjadi terkait dengan tanah perkebunan kelapa sawit dan sikap resistensi penduduk. Resistensi penduduk merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan berbagai cara sebagai suatu gerakan moral-sosial masyarakat adat setempat dalam menuntut hak-hak atas tanah yang digunakan untuk perkebunan. Bagian ketujuh, suatu analisis dan refleksi dari perspektif *Livelihood* tentang keberadaan perkebunan kelapa sawit dan kehidupan Orang Kampung Workwana. Bagian kedelapan merupakan kesimpulan dan penutup dari seluruh tulisan yang dibuat.

Kontribusi Studi

Kontribusi studi kasus mengenai permasalahan kelapa sawit di Kampung Workwana dilihat dari tujuan dan manfaat studi yang dilakukan. Pengalaman di Workwana memperlihatkan terjadi suatu proses transformasi sosial-budaya dan ekonomi dari kehidupan subsisten ke suatu kehidupan baru sebagai petani kelapa sawit. Namun setelah 25 tahun, warga Kampung Workwana berhenti bergiat sebagai petani sawit sehingga memberi kesan penduduk mengalami kemandekkan hidup, berada dalam tekanan dan guncangan hidup serta rentan mengalami kemiskinan. Dalam situasi tersebut muncul sikap resistensi penduduk terhadap perusahaan kelapa sawit, penduduk menuntut hak-hak atas tanah yang digunakan di satu sisi, dan di sisi lain, penduduk berusaha mensiasati bentuk-bentuk *Livelihood* atau penghidupan yang baru dengan berbagai cara karena kehidupan harus berkelanjutan.

Dari segi tujuan, studi ini dapat dikatakan ingin menggambarkan latar belakang kehidupan penduduk asli Workwana, yang bermatapencaharian subsisten sekaligus sebagai petani kelapa sawit. Sebagai penduduk yang masih mencari nafkah secara subsisten sesungguhnya mereka kehilangan ruang mata pencaharian yang bersifat subsisten karena telah terjadi alih fungsi dan alih kepemilikan hutan dan lahan sebagai perkebunan kelapa sawit, pemukiman transmigrasi dan lain-lain. Sedangkan sebagai petani kelapa sawit muncul sejumlah persoalan yang menyebabkan warga Kampung Workwana berhenti mengelola kebun kelapa sawit. Ketika penduduk kampung ini tidak lagi bergiat dalam hidup secara subsisten dan juga tidak mengembangkan usaha kelapa sawit, muncul pertanyaan, bagaimana kehidupan penduduk tersebut berlangsung? Ternyata yang ditemukan melalui studi ini ialah sesungguhnya penduduk setempat mampu mensiasati kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mempertahankan bahkan mengembangkan hidup secara berkelanjutan. Dengan kata lain, pengalaman studi kasus di Workwana mau menunjukkan bahwa penduduk setempat sesungguhnya mempunyai strategi tertentu untuk mempertahankan dan mengembangkan hidup agar terjadi penghidupan yang berkelanjutan (*Sustainable Livelihood*). Oleh karena itu penulis menggunakan perspektif *Livelihood* untuk melihat lebih jauh pengalaman pengumpulan hidup penduduk Workwana dan mempelajari bagaimana mereka memanfaatkan potensi-potensi yang ada, strategi-strategi apa yang digunakan sehingga mereka tetap eksis mengembangkan kehidupannya. Secara teoris, perspektif *Livelihood* menyatakan bahwa suatu masyarakat selalu mempunyai tiga kekuatan hidup yaitu kapabilitas *livelihood* (*livelihood capabilities*), barang-barang dan sumber daya (*stores and resoucers*) sebagai aset yang kelihatan (*tangible assets*) serta hak-hak dan akses-akses (*claim and accses*) sebagai aset-aset yang tidak kelihatan (*intangible assets*). Tiga prinsip *livelihood* menyadarkan penulis tentang dua hal: pertama, bahwa kehidupan penduduk setempat bukanlah merupakan suatu kehidupan yang stagnan atau mandek karena kehilangan peluang mata pencaharian yang bersifat susbsisten dan sebagai petani kelapa sawit;

kedua, kehidupan penduduk setempat entah yang bersifat subsisten maupun bentuk-bentuk usaha yang bersifat produktif tidak dapat diremehkan atau dipandang sebelah mata dan dapat digantikan begitu saja dengan bentuk-bentuk mata pencaharian baru yang lebih modern dan bersifat kapitalsitik (Bdk. Akhmad, 2005 dan Karma, 2005). Inilah tujuan penting lainnya dari penggunaan pendekatan perspektif *Livelihood*, dalam menganalisis temuan-temuan studi kasus ini.

Kemudian, dari segi manfaat, studi ini sebenarnya memberikan kontribusi pemahaman tentang latar belakang situasi penduduk kampung yang sedang mengalami dampak pembangunan yang justru menimbulkan situasi krisis di aspek lingkungan hidup, ekonomi, kelembagaan dan sosial-budaya di satu sisi. Di sisi lain fenomena pembangunan perkebunan kelapa sawit di Distrik Arso Kabupaten Keerom yang mengakibatkan terjadinya krisis-krisis tersebut menyebabkan munculnya sikap resistensi penduduk sebagai tanggapan terhadap krisis yang terjadi dan dialami. Dengan kata lain resistensi penduduk merupakan ekspresi sikap moral sosial penduduk menolak sistem pendekatan monokultur kelapa sawit sebagai *Livelihood* baru yang menyebabkan mereka kehilangan hak ulayat. Manfaat lain dari studi ini ialah ditemukan fenomena peran perempuan dan kaum berpendidikan serta kelompok tunakarya yang mensiasi kemandekkan hidup akibat konflik berkepanjangan terkait persoalan hak-hak ulayat dengan strategi *coping* untuk memperjuangkan dan mewujudkan *Sustainable Livelihood*.

Akhirnya, seluruh hasil studi dan temuan ini akan digunakan sebagai bahan usulan bagi kebijakan pembangunan masyarakat kampung sebagai bentuk intervensi pembangunan yang bersifat *Sustainable Livelihood* penduduk setempat. Tekanan yang ingin diberikan sebagai sugesti terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerah ini ialah, pertama, perlu adanya *affirmatif action* peningkatan kapabilitas penduduk melalui program pemberdayaan berkelanjutan; kedua, perlu pengembangan strategi *Sustainable Livelihood* melalui program-program diversifikasi *Livelihood* bagi penduduk Workwana. Program-program intervensi

dimaksud merupakan bentuk bantuan pengembangan strategi *coping* atau (*coping strategy*) atau strategi penangkalan situasi rentan dan keterpurukan karena tekanan dan goncangan dalam hidup akibat perubahan yang terjadi melalui pendekatan sistem pembangunan ekonomi yang bersifat monokultur dan ekstraktif. Bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan seharusnya merupakan upaya-upaya penguatan dan pengembangan *Livelihood* penduduk yang ada dan bukan merupakan penggantian atau pengalihan *Livelihood*. Dengan demikian pengembangan kelapa sawit hendaknya merupakan bagian dari diversifikasi *Livelihood* penduduk dan bukan merupakan pendekatan usaha-usaha yang berwatak ekstraktif dan bersifat monokultur semata-mata yang berdampak menghancurkan *Livelihood* penduduk, lingkungannya, struktur dan sistem kelembagaan penduduk dan budaya setempat.

